

**STRATEGI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU  
USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



**EKA FITRIA**  
**NIM.2019B1C030**

**PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI BISNIS  
KONSENTRASI ENTREPRENEUR**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**STRATEGI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU  
USAHA KECIL MENENGAH  
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Oleh :

**EKA FITRIA**  
**2019B1C030**

Untuk Memenuhi Ujian Akhir  
Pada tanggal 22 Juni 2023

Menyetujui  
**Pembimbing**

**Pembimbing I**

Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M  
NIDN. 0828108404

**Pembimbing II**

Sudarta, S.Sos., MN  
NIDN.0802048008

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Administrasi Bisnis**



Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M  
NIDN. 0828108404

## LEMBAR PENGESAHAN

### STRATEGI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

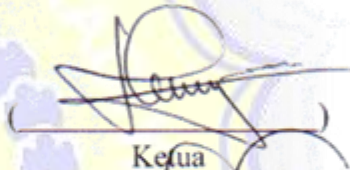
Oleh ;

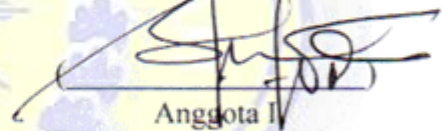
**EKA FITRIA**  
**2019B1C030**

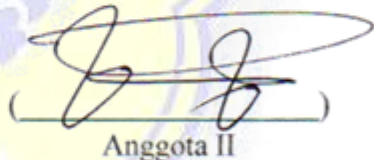
Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 22 Juni 2023  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M  
NIDN. 0828108404
2. Sudarta, S.Sos.,MM  
NIDN. 0802048008
3. Ramayanto, M.M  
NIDN. 0809096702

  
Ketua

  
Anggota I

  
Anggota II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si  
NIDN.0806066801



## PERNYATAAN ORIENTALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram:

Nama : Eka Fitria

Nim : 2019B1C030

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Strategi Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Sumbawa Barat*" adalah hasil karya tulis saya sendiri. Karya tulis ini adalah murni gagasan dan rumusan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan dan kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ditemukan terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

Mataram, 16 Juli 2023  
Mahasiswa,



Eka Fitria  
2019B1C030



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA fitria  
NIM : 2019B1C030  
Tempat/Tgl Lahir : Taliwang, 08 oktober 2000  
Program Studi : Administrasi Bisnis  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 085 - 337 - 262 - 388  
Email : eka.fitria0810000@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa Barat  
Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha kecil Menengah di  
Kabupaten Sumbawa Barat.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. ~~50~~ 443

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 18 Juli 2023  
Penulis



Eka fitria  
NIM. 2019B1C030

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A. uky  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Fitriani  
NIM : 2019B1C030  
Tempat/Tgl Lahir : Taliwang, 08 Oktober 2000  
Program Studi : Administrasi Bisnis  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 085 337 262 388  
Jenis Penelitian  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa Barat  
Dalam pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di  
Kabupaten Sumbawa Barat.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 18 Juli 2023  
Penulis



(Eka Fitriani)  
NIM. 2019B1C030

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

Allah Berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 286 :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendoat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatannya) yang dikerjakan”

( Penulis )

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada Orang Tua tercinta Ibu (Sahora), Bapak (Salim), dan Saudara-Saudaraku, ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti, hormat, dan kasih sayang penulis serta sangat-sangat berterimakasih banyak atas segala dukung-an berupa do'a, perhatian, masukan-masukan, dan kasih sayang serta dukungan materi yang di berikan sehingga penulis dapat me-nyelesaikan perkuliahan ini.
2. Kepada seluruh teman-teman khusus nya kelas Bisnis 1<sup>B</sup> Angkatan 2019, ini penulis persembahkan untuk kalian sebagai tanda terimakasih dan sayang penulis. Tanpa bantuan, kehadiran dan motivasi kalian tidak dipungkuri kalau saya bisa berhasil menyelesaikan perkuliahan ini dan bisa wisuda tepat waktu bareng kalian.
3. Kepada Almamaterku Universitas Muhammadiyah Mataram, ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti, bahwa penulis **Eka Fitria Nim 2019B1C030** telah menyelesaikan tugas akhir sebagai persyaratan wisuda untuk menempuh jenjang S1 dengan tepat waktu serta sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Strategi Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Sumbawa Barat”**. Tak lupa shalawat serta salam dihaturkan kepada Baginda kita Nabi Besar nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing umatnya menuju jalan yang diridhoi-Nya.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Ucapan terima kasih ini ditunjukkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab., M.A Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M Selaku Ketua Prodi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H. Junaidy, AM., M.P. Selaku Dosen Pembimbing I di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Sudarta, S.sos., M.M. Selaku Dosen Pembimbing II di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Orang tua tercinta Bapak Salim dan Ibu Sahora yang selalu menjaga saya dalam doa-doanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah Bapak dan ibu

berikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kedua orang paling berharga dalam hidup saya.

7. Adik-adik saya Dwi satria dan Tryngadewi syahwa athaya yang kakak sayangi. Saya berjanji untuk menjadi kakak yang lebih baik lagi untuk kalian.
8. Kakek nenek saya yang senantiasa menyayangi cucu pertamanya. Terimakasih atas curahan kasih dan sayangnya dan atas semua nasihat petuah hidup yang akan selalu cucu mu ini ingat serta keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada saya baik secara materi maupun non materi.
9. Sahabat sahabat baik saya geng menteri ceria yaitu Hindun fitria, Hanifah Muafin, Meri Iswantari dan Rini Astuti yang selalu menyediakan pundak dan memberi bantuan saat saya membutuhkan serta teman teman KKN saya yang kebersamai selama 45 hari dan menjadi keluarga sampai saat ini.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin saya menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam menyusun skripsi ini dan dapat berguna bagi saya dan pembaca.

Mataram, 12 November 2022

Eka Fitria

**STRATEGI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA KECIL  
MENENGAH DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Eka Fitria<sup>1</sup>, Lalu Hendra Maniza<sup>2</sup>, Sudarta<sup>3</sup>  
Mahasiswa<sup>1</sup>, Pembimbing Utama<sup>2</sup>, Pendamping<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Strategi dan Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sumbawa Barat serta Apa Hambatan Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan Fasilitas dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan mengumpulkan data menggunakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Fasilitas yang diberikan oleh Diskoperindag yaitu dalam bentuk pengadaan barang, pemberian modal serta pelatihan dan pelayanan berbentuk fisik dan jasa dimana para pegawai memberikan dan mencari informasi mengenai UMKM. (2) Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskoperindag Sumbawa Barat sudah memfasilitasi dalam bentuk pemberian modal usaha sesuai kriteria, pelatihan serta bimbingan yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Diskoperindag Kabupaten Sumbawa Barat walaupun masih kurang optimal dikarenakan ada beberapa kendala serta hambatan terkait rendahnya keterampilan dari Para Pelaku Usaha serta pengurus UMKM dalam pengembangan, pendampingan serta pemberian informasi kepada UMKM.

Kata Kunci : Strategi, Pemberdayaan, Pelaku Usaha Kecil Menengah



**WEST SUMBAWA COOPERATIVE AND SME OFFICE'S STRATEGY IN EMPOWERING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN WEST SUMBAWA REGENCY**

**Eka Fitria<sup>1</sup>, Lalu Hendra Maniza<sup>2</sup>, Sudarta<sup>3</sup>**  
**Researcher<sup>1</sup>, First Supervisor<sup>2</sup>, Second Supervisor<sup>3</sup>**  
**Department of Business Administration, Faculty of Social and Political Sciences**  
**Muhammadiyah University of Mataram**

**ABSTRACT**

*This research was conducted to determine the strategies and roles of the West Sumbawa Cooperative and SME Office in empowering small and medium enterprises in the West Sumbawa Regency and the obstacles faced by the Office in providing facilities and services to small and medium enterprise actors. This study utilized a qualitative descriptive research design with a case study methodology to capture data via observation, interviews, and documentation. The techniques used for data analysis were data reduction, data presentation, and data verification. These are the findings of this research: (1) The Cooperative and SME Office's services include procuring products, providing capital, training, and physical and service-based assistance, with staff members providing and seeking information about SMEs. (2) The West Sumbawa Cooperative and SME Office have facilitated the provision of business capital following established criteria and providing training and guidance in the past. Nonetheless, these strategies are suboptimal due to several obstacles and challenges associated with the lack of business actor and SME manager skills in SME development, mentoring, and information provision.*

**Keywords:** *Strategy, Empowerment, Small and Medium Enterprises*

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

**KEPALA**  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



**H. Haimaira, M.Pd**  
NIDN. 0303048601

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORIENTALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Landasan Teori.....	18
2.3 Kerangka Berpikir.....	33
<b>BAB III</b>	
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Penentuan Responden.....	34

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV</b>	
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas .....	42
4.2 Strategi dan Peran Diskoperindag.....	47
4.3 Fasilitasi dan Pelayanan terhadap pelaku usaha.....	76
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan .....	82
5.3 Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>





## DAFTAR TABEL

1.1. Jumlah Pedagang Menurut Tipe dan Kecamatan (Unit).....	5
1.2. Jumlah Usaha Industri Menurut Klasifikasi Usaha (Unit).....	6
2.1. Peneliti Terdahulu.....	13
2.2. Perbedaan Persamaan.....	16
4.1. Target dan realisasi indikator kinerja.....	49
4.2. Data UMKM Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.....	56
4.3. Pelatihan pelaku UMKM.....	66
4.4. Pelatihan Bimbingan untuk Koperasi.....	67
4.5. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	77
4.6. Tabel Rekapitulasi Jumlah UMKM.....	77
4.7. Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat – Tahun 2014-2017.....	78

## DAFTAR GAMBAR

2.1. Kerangka Berikir.....	33
4.1. Bagan Organisasi.....	44



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berkembang menuju perubahan untuk kemajuan bangsa. Untuk mencapai tujuan transformasi tersebut, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dan masalah seperti ekonomi rendah dan pemberdayaan masyarakat yang pasif atau kurang aktif. Dalam meningkatkan pemberdayaan yang pada dasarnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat memiliki banyak masalah lain yang harus diatasi. Salah satu bagian terpenting dari negara adalah pemerintah. Pemerintah adalah satu lembaga yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab penuh untuk penyelesaian suatu masalah di negara, salah satunya dengan dibentuknya layanan Dinas koperasi dan UMKM sebagai wadah pemberian dan penggerak masyarakat dalam mengelola sumber daya manusia agar memiliki kapasitas dan kemandirian yang mandiri khususnya pada pelaku usaha UMKM.

Usaha Kecil Menengah (untuk selanjutnya disingkat UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga baru yang dapat menunjang pemasukan ekonomi



rumah tangga. Terlepas dari pada itu, UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika di-bandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. Para UKM masih butuh perhatian khusus dan dibekali informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Beragam jenis produk dari deretan pelaku bisnis UKM diketahui memiliki kualitas baik. Hal ini disebabkan oleh atas dasar keinginan mereka sehingga mampu bersaing di pasar. Sekalipun para pelaku bisnis tersebut bertaraf UKM tetapi mereka mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas sebelum barang yang mereka hasilkan akan dipasarkan. Kondisi persaingan pasar yang kompetitif menjadi aspek yang tidak lepas dari perhatian, sehingga mereka harus bersaing satu sama lain untuk mampu menjadi yang diminati pasar, tidak menutup kemungkinan untuk mereka bersaing dengan perusahaan besar. Terdapat beberapa alasan para pelaku bisnis UKM dalam memper-timbangkan aspek mutu dan kualitas tentu salah satunya dikarenakan ke-sadaran mereka terhadap konsumen dan calon konsumen yang lebih selektif sebelum melakukan keputusan pembelian.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan bagian dari dunia usaha nasional dan memiliki posisi, potensi, dan peran yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya perkembangan UMKM di Kabupaten Sumbawa Barat terus berlanjut dan mengalami berbagai masalah yang melemahkan daya saing produk impor. Tantangan terbesar UMKM khususnya di Sumbawa Barat adalah terbatasnya

infrastruktur dan akses pemerintah terhadap perizinan dan birokrasi dan biaya yang tinggi. Terlepas dari semua masalah yang ada, peluang bagi UMKM besar terhalang. Meski dikatakan bahwa usaha kecil dan menengah selamat dari krisis global, pada kenyataannya masalah yang mereka hadapi jauh lebih serius. Sebab selain itu dampak tidak langsung dari krisis global, UMKM yang menghadapi masalah domestik yang belum terselesaikan seperti pengupahan, ketenagakerjaan pungutan liar, korupsi dan lain sebagainya.

Hal ini menjadi permasalahan di antara banyaknya permasalahan yang saat ini terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan dan pertumbuhan lapangan kerja dan keterbatasan sumber daya manusia pelaku usaha seperti akses pasar, permodalan, pengembangan IT dan sumber daya manusia. Masalah ini tentu saja menjadi kendala besar dalam perekonomian global yang semakin kompetitif ini. Mengenai perkembangan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat, diakui sebagian besar pelaku UMKM menghadapi berbagai permasalahan. UKM mengalami kesulitan pengembangan juga karena pengembangannya masih tradisional, kualitas manusia belum mencukupi, skala dan teknik produksi masih rendah, dan ketersediaan lembaga keuangan terbatas, serta peluang lokal belum dapat dimanfaatkan oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No.32 tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Presiden Republik Indonesia menyebutkan “Pembinaan dan Pengembangan adalah upaya yang

dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.” Instruksi Presiden No.10 tahun 1999 tentang pemberdayaan usaha menengah menimbang bahwa dalam pembangunan ekonomi kerakyatan usaha menengah mempunyai peranan yang penting dan strategis untuk mewujudkan struktur dunia usaha nasional yang kokoh.

Perhatian terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah sangat diperlukan karena Sektor ini yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja dan secara langsung menggerakkan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian bertujuan memberikan informasi mengenai strategi pengembangan sektor usaha kecil menengah di Provinsi NTB yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal usaha kecil menengah menggunakan analisis SWOT. Dengan mencantumkan isu-isu internal dan eksternal yang menguntungkan dan tidak menguntungkan di empat kuadran analisis SWOT, para perencana dapat lebih memahami bagaimana kekuatan dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan peluang baru dan memahami bagaimana kelemahan dapat memperlambat kemajuan atau memperbesar ancaman. Serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumbawa Barat perlu mengadopsi strategi yang fleksibel dan beragam sesuai dengan kebutuhan dan kondisi eksternal dimana bisnis beroperasi.

**Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Menurut Tipe dan Kecamatan (Unit)**

Kecamatan	Pedagang Besar			Pedagang Menengah			Pedagang Kecil		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
<b>Sekongkang</b>	0	0	0	5	5	7	49	116	114
<b>Jereweh</b>	0	0	0	8	15	18	73	358	386
<b>Maluk</b>	0	0	0	7	5	11	43	312	364
<b>Taliwang</b>	3	4	4	15	198	365	339	815	1.026
<b>Brang ene</b>	1	0	0	1	3	3	36	125	134
<b>Brang rea</b>	0	0	0	1	15	69	68	132	186
<b>Seteluk</b>	1	1	1	2	19	19	119	246	317
<b>Poto Tano</b>	0	0	0	1	4	5	27	164	179
<b>Hasil</b>	5	5	5	40	264	497	754	2.268	2.736

*Sumber : Dinas perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa*

*Barat*

Berdasarkan tampilan di atas menunjukkan bahwa capaian Jumlah Pedagang Menurut Tipe dan Kecamatan (Unit) ini menunjukkan trend



berkembang dari tahun ke tahun khususnya di tahun 2013 hingga 2015 dengan total seluruh kecamatan yaitu pedagang besar dengan 15 Unit, pedagang menengah 801 unit dan yang terakhir pedagang kecil dengan 5.758 Unit.

**Tabel 1.2 Jumlah Usaha Industri Menurut Klasifikasi Usaha (Unit)**

<b>Klasifikasi Usaha Industri</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>
Industri makanan, Minuman, dan Tembakau	178	26	-
Industri Tekstil, Pakaian jadi dan Kulit	53	44	-
Industri Kertas, Barang Barang dari kertas, Percetakan dan Penerbitan	28	1	-
Industri Kimia dan barang barang dari Kimia, Minyak Bumi, Batu bara, karet dan plastik	15	0	-
Industri Logam Dasar	0	0	-
Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya	20	11	-
Industri Pengolahan Lainnya	331	49	-
<b>Jumlah</b>	<b>625</b>	<b>131</b>	<b>0</b>

*Sumber : Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM*

*kabupaten Sumbawa Barat*

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa peran UMKM sangat penting di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai *critical engine* untuk mendukung perekonomian nasional dan daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional (Infotorial).

Dalam hal ini dibutuhkan keterlibatan semua pihak terutama pemerintah daerah untuk membangkitkan kembali koperasi di KSB sebagai pihak penggerak ekonomi masyarakat sesuai dengan tema di atas yaitu dengan menghadapi semua tantangan sesuai dengan aturan dan dengan sikap optimis dan tangguh agar usaha kecil dan menengah (UMKM) yang rentan dalam praktiknya. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi perbaikan pemerintah yang lebih luas untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan UMKM serta mengembangkan cara untuk mencapai tujuan organisasi.

Pelaksanaan pembangunan daerah tersebut adalah Modal usaha Bariri (MUB). Pemberian modal usaha Bariri merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Ini dicapai melalui proposal modal ventura Bariri, yang juga mencakup modal ventura untuk usaha mikro. Dari segi teknis operasional, peminjam pelaku usaha mikro diwajibkan mengembalikan pinjaman dan menyetor modal 50 persen ke dalam rekening tabungan (simpanan wajib) untuk melaksanakan program Gerakan Menabung Sumbawa Barat (GSBM) dan mengedukasi masyarakat tentang akses. dan ketersediaan layanan perbankan. Pada tahun 2019, program Modal Usaha Bariri berhasil menyalurkan hibah kepada 930

penerima manfaat dari 950 kelompok sasaran. Total anggaran yang terealisasi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp2.750.000.000,00. Berkat mekanisme tabungan wajib penerima, maka total tabungan penerima manfaat program MUB akan meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019 total tabungan penerima manfaat program MUB menjadi Rp. 5.541.823.000,00.

Hal ini memang harus didorong, karena banyak persoalan yang berkaitan dengan masyarakat miskin, seperti keterbatasan modal usaha, lemahnya sumber daya manusia di perusahaan dan keterbatasan pengelolaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ada pula masalah lain yang dihadapi yaitu hubungan dengan perspektif kinerja bisnis yang tidak jelas serta pemasaran dan perencanaan bisnis manajemen serta visi dan misi yang belum stabil. Hal ini dikarenakan pelaku usaha mikro berpenghasilan rendah biasanya mencari penghasilan dengan cara meningkatkan penghasilannya dan memiliki ciri-ciri seperti: usaha milik keluarga yang tetap menggunakan teknologi yang relatif mudah, modal yang minim (sehingga bankable), dan tidak adanya pemisahan modal bisnis dari kebutuhan individu.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya menjadikan koperasi, usaha kecil dan menengah, industri, dan perdagangan daerah lebih berdaya saing yaitu :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mekanisme dan prosedur memulai usaha.

2. Media Informasi yang terbatas terkait dengan publikasi UMKM, industri dan perdagangan. Masih sedikit publikasi terkait UMKM, industri, dan perdagangan dalam memberikan informasi.
3. Biasanya bisnis milik keluarga yang tidak memiliki akses ke jaringan. Karena jumlah produk yang diproduksi sangat terbatas dan kualitasnya rendah, bisnis dan penetrasi pasar sangat sedikit. berbeda dengan bisnis besar yang sudah memiliki teknologi dan jaringan yang solid yang terpelihara dengan baik dan mampu menghasilkan publisitas internasional yang positif.
4. Dinilai sebagai bangsa yang kompetitif karena upaya pemerintah untuk meningkatkan operasional bisnis, sumber daya manusia, industri, dan produksi dari waktu ke waktu, meskipun upaya tersebut belum dilaksanakan. Meski perdagangan terus membaik dari tahun ke tahun, namun iklim bisnis sangat terasa
5. Karena kurangnya informasi tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kurangnya sarana dan prasarana usaha, sarana dan prasarana mereka juga tidak berkembang dengan cepat untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang diharapkan.
6. Implikasi Otonomi Daerah dimana Masyarakat lokal dapat diatur dan dikelola secara mandiri oleh otoritas daerah. Pajak baru untuk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri, dan perdagangan akan dikenakan akibat perubahan sistem ini. Daya saing akan terpuruk akibat kondisi ini jika tidak segera diatasi. Selain itu,



antusiasme daerah yang berlebihan terkadang mengakibatkan keadaan yang kurang menarik bagi pengusaha dari luar daerah untuk mendirikan usaha di daerah tersebut.

7. Bersaing dalam perdagangan bebas dengan pelaku usaha UMKM, industri, dan perdagangan. Dalam hal ini, suka atau tidak suka, mereka dituntut untuk melakukan proses produksi secara produktif dan efisien. Mereka juga harus mampu menghasilkan barang yang memenuhi standar kualitas pasar global, seperti standar ISO 9000 untuk kualitas, standar ISO 14.000 untuk lingkungan, dan standar ISO 9000 untuk hak asasi manusia. masalah ketenagakerjaan dan hak asasi manusia. Negara-negara maju seringkali secara tidak adil menggunakan isu ini sebagai hambatan (Non-Tariff Barrier for Trade). Oleh karena itu, diharapkan koperasi, usaha kecil dan menengah, industri, dan perdagangan harus siap bersaing baik dari segi keunggulan komparatif maupun keunggulan daya saing jangka panjang.
8. Produk yang dihasilkan tidak akan mampu bersaing secara efektif di pasar nasional maupun internasional karena sifatnya yang meliputi umur simpan yang pendek dan akses pasar yang terbatas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan pelaku usaha yang ada di tengah masyarakat, dengan mengambil judul **“Strategi Dinas Koperasi UMKM**

## **Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sumbawa Barat”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah strategi dan peran Dinas koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Apa hambatan Dinas koperasi dan UMKM dalam memberikan fasilitas dan pelayanan terhadap pelaku usaha kecil menengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi dan peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah
2. Untuk mengetahui hambatan Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan fasilitas dan pelayanan terhadap pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Sumbawa Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan dalam mengatasi pemberdayaan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat khususnya Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan terhadap pelaku usaha kecil menengah (pedagang).

## 2. Manfaat praktis

- a. Manfaat bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa Barat yaitu semoga dalam penelitian ini Dinas Koperasi dan UMKM mendapatkan dan mencetuskan ide-ide baru dan program yang lebih bermanfaat sehingga pelaku usaha atau masyarakat merasakan dampak akan keberadaannya Dinas Koperasi dan UMKM.
- b. Manfaat bagi peneliti yaitu diharapkan dengan penelitian ini peneliti bisa lebih memahami manfaat, strategi serta peran Dinas Koperasi dan UMKM untuk menjadi masyarakat yang berkemajuan
- c. Manfaat bagi Akademis yaitu dimanfaatkan sebagai rekomendasi, rujukan atau panduan bagi pembaca dan penulis selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian terdahulu

Temuan yang relevan atau signifikan dari penelitian sebelumnya dibahas dalam konteks penelitian sebelumnya, yang berfungsi sebagai titik awal untuk penelitian selanjutnya dengan menjadi tolok ukur atau referensi.

Berikut adalah beberapa kajian penting untuk kajian ini:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
1	Hesti Kusuma Wardani (2013)	Peranan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan USAHA Kecil Menengah pada kota Malang.	Pemberdayaan UMKM di kota Malang belum maksimal dan terdistribusi dengan baik karena Dinas Koperasi dan UKM kota Malang belum memiliki data yang valid tentang jumlah UMKM kota Malang beserta faktor pendukung dan penghambat. Selain itu peneliti berpesan agar seluruh UKM yang ada di kota Malang harus dikodekan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang.



2	Muhamad Farid Said (2015)	strategi pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros studi kasus pada sektor perdagangan.	<p>Secara taktis, penulis juga dapat menyimpulkan bahwa strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Maros tidak berjalan dengan baik.</p> <p>Bahkan implementasi strategi yang direncanakan telah terjadi. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat kemajuan usaha tersebut untuk dilaksanakan dengan pemberdayaan UMKM. Khususnya model masyarakat sebagai pelaku usaha, yang biasanya memandang strategi pemberdayaan yang dikembangkan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Maros dengan pragmatisme. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM di Kabupaten Maros secara umum dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.</p>
---	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	Elfina Chairunisa (2020)	Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB dalam Pengembangan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).	Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM di Wilayah Nusa Tenggara Barat menerapkan prosedur yang mendesak, yaitu pengembangan khusus, peningkatan, administrasi dan organisasi sistem keamanan dan bisnis yang kemudian diubah menjadi proyek dan latihan yang berbeda, untuk misalnya bekerja dengan persyaratan legalitas dan sertifikat serta arahan khusus dalam upaya pembinaan UKM di Daerah. NTB.
---	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan**

No	Judul Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Peranan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan USAHA Kecil Menengah pada kota Malang. (Hesti Kusuma Wardani (2013)	Lokasi penelitian di kota Malang sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat.	Sama-sama meneliti tentang Strategi pada Dinas Koperasi dan UMKM, Menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif, Tahun penelitian 2013

2.	<p>strategi pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros studi kasus pada sektor perdagangan.</p> <p>(Muhammad Farid Said (2015))</p>	<p>Membahas tentang pemberdayaan yang fokus pada studi kasus sektor perdagangan, Lokasi penelitian terdahulu berada pada Kabupaten Maros sedangkan Penelitian Sekarang berada pada Kabupaten Sumbawa Barat</p>	<p>Menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif, sama membahas tentang pemberdayaan</p>
3.	<p>Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB dalam Pengembangan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Elfina Chairunisa (2020)</p>	<p>Tempat dan objek penelitian yang berbeda yaitu dimana penelitian terdahulu pada Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat sedangkan Penelitian Sekarang pada Dinas Koperasi dan UKM</p>	<p>Sama- sama menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif, objek penelitian yang sama-sama menggunakan Analisis SWOT dan teknik wawancara.</p>

		Kabupaten Sumbawa barat, Tahun Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2020 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Tahun 2022	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 2.2 Landasan teori

### 2.2.1 Pengertian manajemen strategi

Istilah “manajemen” saat ini sudah banyak dikenal di Indonesia, baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan swasta. Hal ini disebabkan karena setiap kegiatan dalam lapangan apapun, cara-cara dalam pencapaian tujuan pada prinsipnya adalah sama, dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, leadership, serta pengendalian upaya dari anggota organisasi tersebut serta penggunaan Sumber daya yang tersedia di organisasi tersebut guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya. Untuk memperjelas pengertian strategi, ada yang mencoba membedakan antara strategi dan taktik, yaitu strategi sebagai sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang sedangkan cara untuk mencapai tujuan jangka pendek disebut taktik.



Pengenalan teknik-teknik manajemen baru, yang banyak berasal dan bersumber dari sektor bisnis, kepada sektor public menghadapi 2 (dua) tantangan besar yaitu: pertama, sulit terpenuhinya aspek konsistensi kebijakan jangka panjang yang dibutuhkan untuk mengakomodasi perubahan organisasi atas perencanaan dan implementasi, dimana perubahan tersebut sering dipicu oleh munculnya teknik teknik baru manajemen. Kedua, model-model akuntabilitas yang relatif sederhana, yang ditemukan di era modern pada era organisasi sektor bisnis, dimana direktur eksekutif bertanggung jawab kepada badan komisaris terhadap 2 hal yaitu formulasi strategi dan implementasi strategi.

Kesadaran untuk berhubungan dengan strategi pada organisasi sektor publik adalah merupakan hal yang baru. Perencanaan merupakan hal umum dilakukan oleh organisasi sektor publik. Berpikir strategi membutuhkan kesadaran dan mindset yang berbeda lebih fokus pada *cause and effect* yang dinamis, persaingan, dan ketidakpastian lingkungan. Strategi merupakan positioning organisasi di masa depan dengan memberikan daya ungkit melalui aset-aset yang dimiliki untuk menciptakan aset yang dapat membawa organisasi pada posisi superior terhadap pesaing melalui penciptaan nilai.

Menurut Ismail Solihin (2012), kata strategi berasal dari kata Yunani “strategos” yang berasal dari “layer” yang berarti militer dan “ag” yang berarti memimpin. Dalam konteks ini, strategi pada mulanya diartikan sebagai seorang jenderal atau sesuatu yang dilakukan para jenderal dalam merencanakan penaklukan dan kemenangan perang. Ada dua pendekatan

dalam mendefinisikan strategi pendekatan tradisional dan pendekatan baru ,walaupun Nanang Fatah menegaskan bahwa strategi adalah langkah-langkah sistematis dan sistematis untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan rencana total (makro) dan jangka panjang. Strategi dipandang sebagai model dan rencana reflektif (terbalik) dalam pendekatan baru, sedangkan strategi dipandang sebagai rencana berorientasi masa depan dalam pendekatan tradisional. Dengan kata lain, strategi pembelajaran dapat dipahami sebagai rencana yang berisi rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi juga dapat dipahami sebagai metode, rencana, atau rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Teknik juga dapat diartikan sebagai garis besar kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap strategi fundamental bisnis terdiri dari empat elemen berikut:

1. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang membutuhkan, mengidentifikasi dan menentukan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi tujuan dari usaha tersebut.
2. pemilihan strategi utama yang efektif untuk mencapai tujuan.
3. penentuan langkah-langkah yang akan diambil dari awal hingga akhir.
4. pemilihan dan pertimbangan tolok ukur dan standar yang akan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan bisnis.

### **2.2.2 Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM)**

Usaha UMKM pasti setia berkontribusi pada pengembangan produk nasional, pengembangan ekspor, produksi kerja dan kewirausahaan, dan

penelitian dan pengembangan pendapatan. Karena usaha kecil merupakan salah satu alat ekonomi terpenting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, prevalensinya dalam perekonomian nasional tidak setinggi dulu.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 1 tahun 2008, Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan lebih dari Rp50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk area pembatas dan bangunan untuk tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha yang dimaksud dengan “menengah” adalah ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang menciptakan produk, jasa, atau produk yang dihasilkan oleh orang atau kelompok orang yang menciptakan produk, jasa, atau produk yang dibuat oleh orang atau kelompok orang yang membuat produk, jasa, atau produk yang dibuat oleh orang atau kelompok yang menciptakan produk, jasa, atau produk yang

dibuat oleh orang atau kelompok yang menciptakan produk, jasa, atau produk

Kriteria termasuk yang berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Usahanya bertujuan untuk memperluas dan mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional berbasis demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usahanya diarahkan untuk mengembangkan dan menciptakan usaha untuk mendorong perekonomian. Ada beberapa kecenderungan terhadap pendaftaran UKM, yang paling jelas di antaranya adalah:

1. Di dalam faktor Internal yaitu tidak adanya modal adalah komponen utama yang dapat diharapkan untuk mengembangkan unit khusus. kemudian tidak adanya Modal UKM, karena dalam usaha kecil dan menengah sehari-hari adalah bisnis tunggal yang sifatnya tertutup
2. Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya manusia untuk UKM baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keahliannya membuat dampak besar pada pengelolaan manajemen bisnis, jadi sulit untuk mengembangkan bisnis secara Optimal.



3. Karena jaringan perusahaan yang lemah dan kemampuan yang rendah untuk menyebar ke UKM, Jaringan bisnis sangat terbatas dan kurang berkualitas dan kurang kompetitif. Hal tersebut merupakan Faktor eksternal sehingga lingkungan bisnis yang tidak sempurna Berguna untuk kebijakan pemerintah Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

### **2.2.3 Kriteria UMKM**

Kriteria UMKM artinya suatu badan ekonomi dapat disebut UMKM jika memiliki ciri-ciri atau karakter tertentu. Berikut adalah kriteria yang relevan:

#### **a. Usaha Mikro**

Kriteria masuk UMKM yang pertama adalah usaha mikro. Ini adalah perusahaan atau bisnis dengan kekayaan bersih bersih sekitar 50 juta euro perbulan. Umumnya, jenis usaha ini tidak mempertimbangkan aset seperti bangunan atau usaha tempat usaha tersebut berada. Selain itu usaha mikro memiliki karakteristik tertentu yaitu seolah-olah mereka tidak pernah melakukan pengelolaan keuangan secara sistematis, sulit mendapatkan bantuan dari bank, barang yang dijual terus berubah, dan bentuk usahanya relatif kecil. Sementara itu misalnya, UMKM yang termasuk dalam kriteria usaha mikro adalah toko kelontong, peternak ayam, peternak lele, penata rambut, wartung nasi dan perusahaan sejenis.

#### **b. Usaha Kecil**

Kepemilikan perseorangan yang tidak diklasifikasikan sebagai badan usaha. Aset perusahaan yang tergolong perusahaan kecil biasanya kurang

dari 300 juta per tahun. Ini adalah kekayaan bersih yang dipehitungkan dengan sempurna.

Usaha kecil juga memiliki karakteristik tertentu. Yakni, belum adanya sistem pembukuan, sulitnya ekspansi usaha, kegiatan non ekspor dan impor serta masih terbatasnya modal. Dari sudut pandang ini, bisnis usaha kecil secara alami berkembang lebih baik dari pada usaha mikro. Misalnya, industri kecil, koperasi, mini market, department store dan lain sebagainya.

### **c. Usaha Menengah**

Sebuah unit bisnis dapat disebut perusahaan menengah jika laba bersih atau aset perusahaan adalah 500 juta per bulan. Namun, seperti kriteria lainnya, perhitungan tidak memasukkan jenis aset seperti tanah dan bangunan sebagai lokasi usaha. Perusahaan menengah biasanya memiliki karakteristik manajemen bisnis yang lebih modern dan menerapkan sistem manajemen keuangan dengan cara yang sangat terbatas.

Selain itu, sebagai aturan, karyawan perusahaan yang memenuhi kriteria perusahaan menengah memiliki asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan. Sedangkan untuk perusahaan sendiri, minimal harus memiliki NPWP, izin lingkungan dan undang-undang lainnya. Perusahaan menengah misalnya perusahaan pabrik, usaha ekspor-impor, perkapalan, dan lain-lain.

Ketiga kriteria ini sebenarnya tipikal UKM. Ini juga sejalan dengan akronim yaitu. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **2.2.3 Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia**

Salah satu sektor yang paling terkena dampak pandemic Covid-19 adalah ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang juga menghambat perekonomian. Hal ini dapat dipahami karena UMKM memiliki dampak terhadap perekonomian nasional yang sangat besar. Menurut kementerian Koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2018 terdapat 64,2 juta UMKM atau 99,99% pelaku usaha di Indonesia. Daya tampung tenaga UMKM mencapai 117 orang juta karyawan yakni 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu pangsa UMKM dalam perekonomian nasional (PDB) adalah 61,1% dan sisanya 38,9% merupakan operator perusahaan besar, dimana hanya 5.550 atau 0,01% orang yang aktif berbisnis.

UMKM di Indonesia didominasi oleh usaha mikro dengan total daya serap 98,68%, yaitu sekitar 89% dari tenaga kerja. Pada saat yang sama pangsa usaha mikro dalam produk bruto hanya sekitar 37,8%. Berdasarkan informasi tersebut, Indonesia berpotensi secara khusus menjadi basis ekonomi yang kuat karena banyaknya UMKM, usaha mikro sangat besar dan konsumsi tenaga kerja sangat tinggi sehingga Negara dan pelaku usaha harus menaikkan kategori usaha mikro ke level yang lebih tinggi. Basis bisnis ini telah terbukti kuat bahkan selama krisis ekonomi. Usaha mikro juga memiliki perputaran transaksi yang cepat dan produksi skala besar dengan kebutuhan masyarakat yang paling penting. Pemerintah memanfaatkan

potensi UMKM dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan pedoman.

#### 2.2.4 konsep pemberdayaan

##### A. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan telah dikemukakan oleh banyak ahli. Jika dilihat dari akar kata, “daya” merupakan kata dasar dan ditambah awalan “ber” yang berarti memiliki kekuatan. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, jadi arti kata berdaya adalah memiliki daya/kekuatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau memiliki daya/kekuatan. Dalam bahasa Indonesia kata empowerment berasal dari bahasa Inggris yaitu *empowerment*. Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mendefinisikan pemberdayaan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. *To give ability or unable to*, memberi kemampuan atau tidak mampu, yang dapat diterjemahkan sebagai melakukan sesuatu dengan kemampuan.
- b. *To give power of authority to*, untuk memberikan otoritas pada, yang memerlukan kekuasaan pemberian.

Semenjak tumbuhnya pengakuan bahwa manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam pembangunan, maka Dalam konteks pembangunan, istilah “pemberdayaan” bukanlah hal yang baru, tetapi sering digaungkan karena semakin dikenalnya peran manusia.



Pemberdayaan masyarakat merupakan isu penting dalam pembangunan manusia yang harus menjadi perhatian seluruh bangsa— sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam bukunya, Wasistiono (1998:46) menggunakan kutipan dari Carlzon dan Macauley untuk menjelaskan bahwa pemberdayaan didefinisikan sebagai “memberi kebebasan kepada seseorang untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakannya serta membebaskannya dari kontrol yang kaku.

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari "*empowerment*" menurut para ahli lain, yang pada intinya menghilangkan hambatan pribadi dan sosial yang menghalangi mereka untuk mengambil tindakan. Hal ini dilakukan dengan memberinya kepercayaan diri yang lebih besar dan kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang dimilikinya, termasuk mentransfer kekuatan dari lingkungan.

Sedangkan menurut beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi pemberdayaan yaitu :

1. Daulay (2006)

Dikatakannya bahwa pemberdayaan merupakan rangkaian upaya agar masyarakat memiliki posisi tawar sehingga dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan secara aktif dan partisipatif.

2. Slamet (2003)

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang memungkinkan individu untuk mengembangkan diri guna meningkatkan kehidupannya. Secara tidak langsung, pemberdayaan merupakan kesempatan bagi

masyarakat untuk melihat peluang dan memanfaatkannya sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan inisiatifnya.

3. Sumodiningrat (1999)

Arti *empowerment* atau pemberdayaan adalah serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluas lunaskan segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat.

4. Elizabeth (2007)

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk memperkuat mereka yang tidak berdaya sehingga pemberdayaan diharapkan dapat membantu dirinya sendiri untuk mengembangkan rasa percaya yang sudah ada.

5. Bhadra (2001)

Penggunaan istilah pemberdayaan yang paling umum adalah mendekati kelompok berdaya rendah dengan kelompok berdaya tinggi dengan cara meningkatkan kekuasaan mereka.

## **B. Implementasi model Pemberdayaan Masyarakat Sentra UMKM**

Pada tahap Model Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan, perlu dilakukan upaya untuk:

a. Implementasi Pemberdayaan masyarakat

Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi keberhasilan model pemberdayaan masyarakat adalah mengidentifikasi pelaku usaha dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pendidikan berkelanjutan.

Hal ini terlihat dari hasil pelatihan-pelatihan khusus, seperti pelatihan pemberdayaan masyarakat, pembiayaan, inovasi produk, dan pemasaran produk. sehingga dapat dilihat kiprahnya dalam memberdayakan masyarakat pesisir di sentra UMKM

#### b. Implementasi Monitoring

masyarakat, pemantauan diperlukan untuk melacak pertumbuhan kewirausahaan dengan lebih baik dan menunjukkan hasil bertahap dari waktu ke waktu. Awasi hasil transformasi pemberdayaan masyarakat dalam keadaan nyata, verifikasi hasil pemberdayaan masyarakat di lokasi pelatihan, dan verifikasi kemanjuran hasil (apa yang mungkin). Diharapkan kegiatan ini mampu mengevaluasi pemberdayaan masyarakat di sentra-sentra UMKM dengan ruang terbuka sehingga dapat dilakukan perbaikan langsung terhadap kondisi fisik yang dibangun kembali. Untuk memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki ruang yang cukup untuk mengimplementasikan model pemberdayaan masyarakat Pusat UMKM, tindak lanjut dapat dilakukan dalam waktu yang cukup untuk menjamin implementasi yang benar dan konsisten. di pusat-pusat UMKM di sepanjang pantai.

#### c. Evaluasi hasil implementasi

Pengaruh jaringan di daerah pantai harus dinilai sehubungan dengan pelaksanaannya untuk mengetahui keadaan sebenarnya di daerah yang dilakukan karena persiapan oleh UKM (ini bisa dilakukan).

#### d. Keberhasilan model pemberdayaan masyarakat

Melalui pelatihan kebutuhan pelaku UMKM, tanggapan peserta pelatihan (saran dan pendapat, keluhan dan kepuasan), serta permintaan kebutuhan pelatihan ke depan (dengan berbagai materi), model pemberdayaan masyarakat membantu sentra UMKM masyarakat pesisir. Selain itu, agar model pemberdayaan masyarakat berbasis pelatihan berhasil, diperlukan keterlibatan dalam pengembangan usaha, legalitas usaha, dan pemasaran produk, serta pertumbuhan usaha dan keberlanjutan.

Hal ini tidak dapat terjadi tanpa keterlibatan orang-orang dari pemerintah lurah setempat, camat di daerah tersebut, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, dan perguruan tinggi.

### **C. Pengembangan Model Manajemen Sentra UMKM**

Karena tidak ada cara lain agar model pemberdayaan masyarakat sentra UMKM dapat efektif dan bertahan di lingkungan ini, maka tahapan pengembangan merupakan upaya pemberdayaan pengusaha UMKM untuk menghadapi perubahan masa depan yang mengancam keberlangsungan usaha UMKM itu sendiri. Upaya untuk memastikan bahwa hidup dekat dengan pusat-pusat UMKM untuk pengembangan masyarakat yang dinamis dan dapat diterima harus mengiringi persaingan yang dinamis. Proses pematangan UMKM agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin kompleks dan sulit dikenal dengan tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan, kami mencoba melihat bagaimana para pelaku UMKM sesekali dapat mengarahkan kegiatannya dengan memanfaatkan



pengelolaan usaha yang memadai, mengikuti perubahan model pengelolaan sentra UMKM yang berlaku, serta melanjutkan kegiatan kreatif dan inovatifnya. yang dapat dilakukan secara rutin.

Pola langsung dapat digunakan untuk menyelesaikan fase pengembangan, yang terdiri dari:

- a. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di masyarakat
- b. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan tersebut dan memenuhi kebutuhan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang sangat kompleks, khususnya perubahan fasilitas fisik dan peningkatan pelayanan.

#### **D. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro**

Dalam mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

- a. Menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan Usaha Mikro menjadi tangguh dan mandiri.
- b. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro
- d. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Mikro;

- e. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- f. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas.
- g. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri dan
- h. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam:

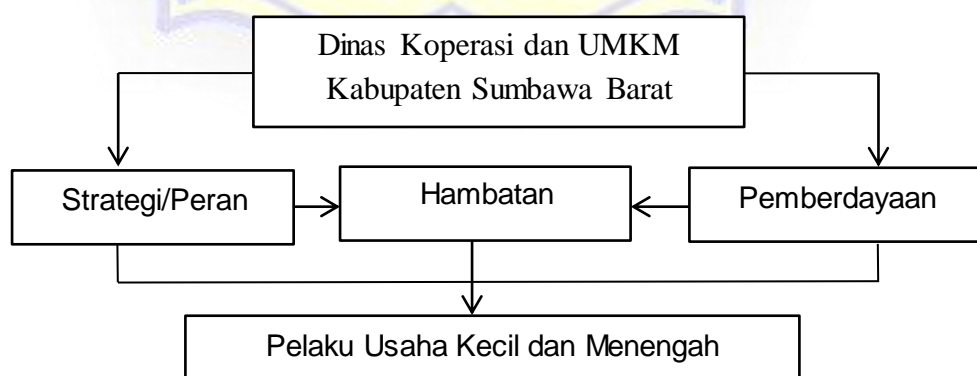
1. Aspek manajemen yang meliputi: peningkatan produktivitas/omzet/tenaga kerja/jumlah karyawan, peningkatan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia
2. aspek permodalan, yang meliputi: dukungan permodalan (pengurangan 1-5% laba BUMN dan kewajiban penyaluran kredit kepada usaha kecil minimal 20% dari portofolio kredit bank) dan pagu kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK , Kredit Mini/Midi, K KU).
3. mengembangkan program kemitraan dengan perusahaan besar atau melalui skema yang disetujui induk, PIR, forward, reverse, modal ventura atau perjanjian outsourcing.
4. pengembangan kawasan sentra industri kecil berupa PIK (Permukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), dan SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) dengan dukungan dari TPI (Penyuluh Industri) atau UPT (Unit Pelayanan Teknis).

### 2.3 Kerangka berpikir

UKM di Provinsi NTB khususnya Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai potensi yang lebih untuk dapat dilihat dari fakta-fakta yang menunjukkan adanya tingkat perkembangan dari waktu ke waktu. Pada masa krisis pun dari sekian banyak sector UMKM lah yang menjadi alternatif atau kesempatan kerja bagi sekian banyak tenaga kerja yang da. Selain itu, UKM juga dapat dijadikan sebagai katup pengaman sebagai terhadap kondisi ekonomi. Oleh karena itu, sangat dibuthkan adanya suatu agar lebih mengembangkman potensi sector ekonomi. Oleh karena itu, sektor UMKM baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Dalam melaksanakan program-program kerja yang telah disusun, pasti tidak terlepas dari eber[a faktor penghambat dan pendukung berhasilnya program tersebut. Salah satunya adalah faktor pemberdayaan tersebut dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM yang di bina dapat berjalan secara mandiri. Kerangka berpikir ini dapat diperjelas dengan skema berikut ini :

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan analitis. Dalam hal ini penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif secara sistematis, faktual dan akurat tentang fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta dengan cara mengumpulkan informasi, menjelaskan dan menganalisis secara objektif, artinya hasil penelitian ini diperoleh. dalam penelitian lebih ditekankan pada pendeskripsian objek penelitian yang nyata atau nyata, yang berkaitan dengan petunjuk penulisan artikel ilmiah berupa tesis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Penelitian ini kemudian mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan variabel penelitian yang relevan.

#### **3.2 Penentuan Responden**

Menurut Moleong (2019:97) informan peneliti yaitu seseorang yang tahu dan dapat menginformasikan tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, peneliti berusaha mencarinya yaitu menggunakan informan responden. Dalam penelitian ini, teknik tersebut digunakan dalam penentuan responden yang ditargetkan



menggunakan teknik sampling yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan aspek-aspek tertentu (Sugiono: 2011).

Untuk memperoleh data maka diperlukan informan dalam penelitian ini. Menurut suyanto (2011: 172) terdapat dua kategori informan sebagai berikut :

1. Informan kunci

Merupakan seseorang yang mengetahui informasi pokok yang diperlukan oleh peneliti. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu, Kepala Bidang Koperasi UMKM Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Informan Utama

Para pelaku usaha UMKM

### **3.3 Lokasi dan waktu Penelitian**

penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang lebih singkat setidaknya 2 bulan. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yang pertama adalah kesiapan penelitian, konsultasi kepada dosen pembimbing, tahap terakhir adalah studi lapangan.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penyusunan skripsi agar sasaran tercapai sehingga diperlukan adanya data data dari berbagai sumber yang nantinya akan disusun dan diolah untuk memperkuat analisis. Menurut Moleong (2001:112), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Dan penelitian menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan sekunder. Kedua jenis data ini diharapkan

dapat meningkatkan nilai validitas penelitian sehingga dapat dianalisis dengan mudah.

#### 1. Data Primer

Seperti disebutkan sebelumnya, data primer adalah alternatif lain dari data sekunder. Kata primary adalah kebalikan dari secondary yang artinya paling penting, asli, atau langsung dari sumbernya. Pengertian informasi latar belakang adalah informasi asli yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk menjawab permasalahan penelitian tertentu. Informasi ini tidak tersedia karena penelitian serupa belum pernah dilakukan sebelumnya atau hasil penelitian serupa sudah kadaluarsa. Jadi peneliti harus mengumpulkan/memperoleh datanya. Dalam penelitian SDM (Sumber Daya Manusia), data primer diperoleh langsung dari sumbernya, misalnya dari pendapat karyawan, sehingga peneliti menjadi “tangan pertama” yang menerima informasi tersebut.

Karena peneliti sendiri yang melakukan pengumpulan data, maka dalam hal ini dibutuhkan lebih banyak komitmen daripada memperoleh data sekunder. Penelitian berdasarkan data primer membutuhkan waktu, sumber daya dan biaya yang relatif lebih banyak, seperti biaya perjalanan, biaya material atau peralatan berupa kertas kerja, insentif bagi pengumpul data dan biaya lainnya. Namun, keandalan data mentah relatif tinggi karena peneliti dapat memverifikasi data yang digunakan dalam penelitiannya. Berdasarkan sifatnya, data primer dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. (Istijanto 2005:38)

## 2). Data Sekunder

Perbedaan utama antara pengetahuan dan informasi adalah bahwa data adalah fakta atau ukuran tertentu dari suatu fenomena, sedangkan pengetahuan adalah bentuk fakta tertentu untuk mengambil keputusan atau dalam konteks tertentu yang menciptakan hubungan tertentu antara satu data dengan data lainnya. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki ribuan catatan acara yang tidak diterjemahkan dan mentah. Rekaman peristiwa ini disebut data. Data untuk setiap peristiwa kemudian dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses dan dianalisis. Sampai informasi memiliki arti bagi administrator, itu tidak dapat disebut informasi. Agar data memiliki nilai informatif, misalnya harus memiliki informasi tentang total penjualan produk per toko, penjualan produk di seluruh negara, yang menjadi dasar untuk meramalkan permintaan pasar berikutnya. sepuluh tahun, dll. pada. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan disimpan oleh orang lain, yang biasanya berupa data masa lalu/historis. Potensi pasar sering diprediksi menggunakan data sekunder. Dalam banyak kasus, ketika data sekunder yang diperlukan tidak tersedia, peneliti dapat memperkirakannya dengan mengubah beberapa jenis data sekunder yang berbeda. (Dermawan Wibison 2003:117)

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

#### 1. Interview (Wawancara)

Menggunakan metode wawancara membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan informasi. Dibandingkan dengan distribusi untuk responden survei, wawancara sangat sulit. Dalam wawancara sebaiknya

peneliti memperhatikan sikap setelah kedatangan, posisi duduk, pancaran wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran dan penampilan sangat mempengaruhi isi tanggapan responden yang peneliti terima. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan intensif bagi calon pewawancara.

Secara garis besar ada dua jenis pedoman wawancara yaitu pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar tentang apa yang akan ditanyakan. Tentunya kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan dengan jenis wawancara terbimbing ini hasilnya lebih bergantung pada pewawancara. Pewawancara bertindak sebagai fasilitator dari jawaban responden. Jenis wawancara cocok untuk studi kasus. Dan tipe kedua adalah structured interview guide, yaitu panduan wawancara yang disusun secara detail menyerupai checklist. Pewawancara hanya perlu membubuhkan tanda v (centang) pada angka yang benar. Panduan wawancara yang paling umum digunakan adalah bentuk "semi-terstruktur". Dalam hal ini, pewawancara terlebih dahulu mengajukan serangkaian pertanyaan terstruktur dan kemudian menggali lebih dalam satu per satu, mencari lebih banyak informasi. Jawaban yang diperoleh dengan cara ini dapat mencakup semua variabel dengan informasi yang lengkap dan menyeluruh (Sandu Sitoyo, Muhammad Ali Sodik 2005: 76).

## 2. Observasi

Saat menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format observasi atau blanko sebagai instrumen. Bentuk yang digunakan berisi item tentang peristiwa atau perilaku yang



digambarkan terjadi. Dalam menggunakan metode observasi, peran yang paling penting adalah pengamat. Pengamat harus penuh perhatian dalam pengamatan mereka, yaitu. untuk mengamati peristiwa, gerakan atau proses. Pengamatan bukanlah pekerjaan mudah karena minat dan kecenderungan mempengaruhi orang. Walaupun hasil pengamatannya pasti sama, meskipun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan kata lain, observasi harus objektif. (Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik 2005: 78).

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan Data melalui Metode Dokumentasi Tidak kalah penting dan metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel.(Sandu siyoto,Muhammad Ali Sodik 2005: 79).

### **3.6 Teknik analisis data**

#### **1. Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2020:134) dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (Triangulasi). Pengumpulan data dilakukan membutuhkan waktu sehari-hari atau berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak.

#### **2. Reduksi data**

Jenis analisis yang dikenal sebagai reduksi data yaitu mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan yang pasti dapat ditarik darinya. Tidak perlu menafsirkan reduksi sebagai kuantifikasi data. Metode reduksi data:

1. pemilihan data yang cermat
2. sinopsis atau deskripsi singkat
3. Klasifikasikan mereka dengan cara yang lebih umum.

#### **3. Penyajian data**

Penyajian data adalah proses menyusun sekumpulan data agar dapat diambil keputusan dan ditarik kesimpulan. Berikut adalah bentuk penyajian data kualitatif :

- a. Penulisan naratif: berupa catatan dari bidang jaringan,
- b. Grafik, jaringan, dan bagan. Formulir ini menggabungkan informasi yang ditata dengan cara yang masuk akal dan mudah ditemukan. Hal ini memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan menentukan baik tidaknya kesimpulan

#### **4. Penarikan Kesimpulan**

Dilakukan secara terus menerus oleh peneliti selama berada di lapangan. Peneliti kualitatif memulai dengan mencatat pola reguler (dalam catatan teori), penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi pada awal proses pengumpulan data. Kesimpulan Meskipun kesimpulan diberikan, itu ditangani secara longgar dan tetap ambigu. Awalnya tidak jelas, tetapi semakin dalam dan spesifik, semakin jelas. Sepanjang penelitian, kesimpulan juga dikonfirmasi oleh penelitian berlangsung, dengan cara:

- a. pertimbangkan kembali saat penulisan
- b. pemeriksaan catatan lapangan
- c. tinjauan dan diskusi konsep di antara rekan kerja untuk dikembangkan
- d. kompromi intersubjektif.
- e. upaya signifikan untuk mereplikasi temuan dalam kumpulan data yang berbeda.

